

Festival 1000 Tumpeng: Komodifikasi tradisi, pariwisata, dan ‘territoriality’ di Gunung Kelud

The Festival of 1000 Tumpeng: Commodification of tradition, tourism, and ‘territoriality’ in Kelud Mountain

Edlin Dahniar Alfath

Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya
Jalan Veteran No. 1 Malang – Jawa Timur 65145
e.dahniar@gmail.com; edlin@ub.ac.id

Yogi Setya Permana

Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Gedung Widya Graha LIPI, Lt. XI. Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav. 10 Jakarta 12170
yogi003@lipi.go.id

Abstract

This research explains how tradition can be modified for tourism and political purposes. The tradition that will be elaborated in this essay is "Festival 1000 Tumpeng Kelud". This festival adapts traditional Javanese cultural ceremony. The commodification of tradition is associated with the development of tourism in the area of Kelud Mountain, East Java. Furthermore, tourism activity in Kelud Mountain is part of strategy to defend particular territory in a disputed area. This is ethnography research with qualitative data and descriptive analysis, located in Sugihwaras village. Key informants of this research are special figure in society whom considered as person who can communicate with Kelud Mountain, society representative, BMKG officers, and Village officials. This essay concludes that there are three layers purposes of convening "Festival 1000 Tumpeng" initiated by the government of Kediri namely preservation of traditions and gratitude expression to God, tourism promotion, and politics of territoriality related to disputed area with Blitar Regency.

Keywords: *tourism, territorial dispute, tradition, culture*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tradisi bisa dikomodifikasi untuk kepentingan pariwisata dan politik. Tradisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah “Festival 1000 Tumpeng Gunung Kelud”, sebuah kegiatan yang mengadopsi model upacara tradisional Jawa. Kegiatan ini dilaksanakan sehubungan dengan perkembangan pariwisata di Kawasan Gunung Kelud, yang mana sampai saat ini masih menjadi wilayah sengketa antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. Sementara itu, aktivitas pariwisata di Gunung Kelud sendiri merupakan bagian dari strategi Kabupaten Kediri untuk mempertahankan teritorial tertentu yang menjadi wilayah sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian etnografi dengan data kualitatif dan analisis deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah Desa Sugihwaras. Informan kunci dari penelitian ini adalah tokoh masyarakat yang dianggap sebagai orang yang mampu berkomunikasi dengan Gunung Kelud, wakil masyarakat, petugas BMKG, dan pemerintah desa. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada tiga lapis tujuan dari diselenggarakannya “Festival 1000 Tumpeng” yang diprakarsai oleh pemerintah Kabupaten Kediri ini, yaitu pelestarian tradisi dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, promosi pariwisata setelah menurunnya jumlah wisatawan setelah letusan tahun 2014, dan politik teritorial terkait dengan sengketa dengan Kabupaten Blitar.

Kata kunci: wisata, sengketa wilayah, tradisi, budaya

Pendahuluan

Artikel ini membahas tentang kegiatan “Festival 1000 Tumpeng” yang digelar masyarakat Kecamatan Ngancar atas prakarsa Pemerintah Kabupaten Kediri. Melalui artikel ini, kami berargumen bahwa di balik kegiatan festival tersebut terkandung tiga tujuan Pemerintah Kabupaten Kediri. Pertama, festival ini diselenggarakan pemerintah dan masyarakat dalam rangka melestarikan tradisi nenek moyang.

Kedua, secara tidak langsung festival ini mempromosikan kembali Gunung Kelud yang mengalami penurunan jumlah wisatawan sebanyak 70% setelah erupsi yang terjadi pada Februari 2014. Ketiga, festival ini merupakan bagian dari apa yang disebut dengan *territoriality*, yang mana Pemerintah Kabupaten Kediri berupaya untuk melegitimasi kepemilikannya atas Gunung Kelud di tengah sengketa dengan Kabupaten Blitar.

Penelitian untuk artikel ini dilakukan di Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri yang merupakan desa terakhir sebelum puncak Gunung Kelud. Desa ini sekaligus merupakan desa yang dipersengketakan Kabupaten Kediri dan Blitar. Masyarakat di desa ini memiliki kearifan lokal yang menunjukkan relasi mereka dengan Gunung Kelud. Salah satunya adalah dengan menggelar kegiatan ritual setiap satu tahun sekali dengan tujuan untuk menghindari bencana dan malapetaka yang datang dari Gunung Kelud.

Pemerintah Kediri melihat ritual tahunan masyarakat di sekitar Gunung Kelud sebagai potensi penunjang pariwisata. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Kediri untuk mengembangkan potensi pariwisata di area Gunung Kelud. Pada tahun 2014, pemerintah menjadikan ritual tahunan ini sebagai salah satu acara yang masuk dalam kalender kegiatan Kabupaten Kediri. Dalam acara tersebut pemerintah kabupaten menjadi sponsor utama, dengan mengemas ritual tersebut menjadi satu kegiatan festival yang berjudul 'Festival 1000 Tumpeng'. Sesuai dengan judul acara, kegiatan ini bertema ritual Jawa tradisional, maka disinilah komodifikasi tradisi itu terjadi.

Di sisi lain, kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk meningkatkan intensitas pembangunan pariwisata di area Gunung Kelud, seperti yang terjadi di Desa Sugihwaras, di tengah proses perebutan wilayah yang belum selesai antara dua kabupaten semakin memperburuk relasi keduanya. Pemerintah Kabupaten Blitar menggugat langkah Pemerintah Jawa Timur ke PTUN setelah menerbitkan SK Gubernur No. 188/113/KPTS/013/2012 yang menyatakan bahwa Kelud menjadi bagian dari Kediri (Paradhisa 2012:144). Artinya, meskipun Pemerintah Kediri terus melakukan pembangunan infrastruktur pariwisata, kepemilikan Kawasan Gunung Kelud masih dalam sengketa. Dalam kondisi demikian, komodifikasi tradisi lokal merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menguatkan klaim teritorialnya atas sebagian wilayah Gunung Kelud.

Perkembangan pariwisata di Gunung Kelud ini tidak terlepas dari maraknya perkembangan pariwisata di daerah lain di Indonesia. Beberapa daerah terbukti sukses menjadikan pariwisata sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kabupaten Gunung Kidul di Yogyakarta dan Kota Batu di Jawa Timur adalah contohnya. Di Kabupaten Gunung Kidul, PAD pariwisata tahun 2014 sebesar Rp 15.420.475.427 atau setara dengan \$ 1.110.275. Jumlah ini jauh di atas target yang hanya Rp 7.600.000.000. Pendapatan ini diperoleh dari kunjungan wisatawan yang berjumlah 1.955.817 selama tahun 2014 (KR Jogja 2015). Sementara Kota Batu, pariwisata menyumbang 65% terhadap PAD dan menjadikan PAD Kota Batu sebesar Rp 78 Milyar (\$ 5.616.000) pada 2014. Jumlah ini mengalami kenaikan setelah pada 2013 sebesar Rp 59 Milyar dan Rp 38 Milyar pada 2012 (Jawa Pos 2015).

Dalam konteks nasional, Pemerintah Indonesia juga terus-menerus menggalakkan pengembangan pariwisata. Sejak tahun 1980, pemerintah Indonesia terus gencar mempromosikan pariwisata terutama setelah terjadi penurunan harga minyak bumi. Tahun 1991, sebagaimana yang disampaikan Yamashita (1994), pemerintah Indonesia telah menetapkan "*Visit Indonesia Year*". Melalui program tersebut, Indonesia berhasil mendatangkan 2,6 juta turis asing yang menjadikan ekonomi pariwisata Indonesia saat itu hanya dapat dikalahkan oleh minyak dan gas, kayu, dan tekstil (Yamashita 1994:78).

Untuk pariwisata alam dan budaya, seluruh daerah di Indonesia selalu bercermin kepada kesuksesan Bali. Bali adalah contoh nyata bagaimana suatu kawasan, dalam hal ini pulau, sangat maju dalam segala bidang pariwisata. Seperti yang dikatakan Hitchcock dan Putra (2007:2), Bali telah berhasil secara *branding* dan *marketing*. Pariwisata Bali mampu melahirkan berbagai produk barang dan jasa dengan gaya khas yang sifatnya abadi, seperti hotel-hotel bergaya Bali, restaurant dan alat makan khas, minuman, karya seni, sampai pakaian. Bali telah menjadi *archetype* dari pengalaman liburan di pulau tropis. Maldives adalah salah satu pesaing internasional yang mencoba mencuri model yang dimiliki Bali dengan mempromosikan bungalow bergaya Bali di *resort-resortnya* (Hitchcock dan Putra 2007:24).

Banyaknya daerah yang terbukti berhasil meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata memancing daerah lain untuk melakukan hal serupa. Berbagai hal, baik alam maupun budaya dipromosikan sebagai daya tarik pariwisata. Hal ini diuntungkan dengan dikenalnya Indonesia sebagai negara yang memiliki keindahan alam dan budaya yang berbeda dengan daerah lain. Apalagi sebagaimana yang dikatakan oleh MacCannel (dalam Cohen 1988) bahwa pencarian *authenticity* (alam ataupun budaya) menjadi motif utama pariwisata modern. Dalam perbincangan studi pariwisata, tentang *authenticity* ini memang banyak dibicarakan, khususnya terkait dengan komodifikasi budaya atau tradisi.

Komodifikasi telah menjadi perdebatan utama dalam studi wisata budaya. Perdebatan ini terjadi antara pihak yang beranggapan bahwa komodifikasi budaya tidak berdampak negatif dan pihak yang menganggap komodifikasi akan mengurangi nilai dan makna dari suatu budaya. Komodifikasi budaya untuk tujuan pariwisata telah menjadi tema-tema tulisan peneliti terdahulu. Tentang hal ini, penelitian ini mengambil tiga referensi terkait komodifikasi budaya sebagai tinjauan pustaka.

Pertama, melalui *paper*nya tentang Tari Caci di Nusa Tenggara Indonesia, Erb (2001) mempertanyakan bagaimana Tari Caci yang biasanya ditampilkan pada ritual-ritual penting yang berhubungan dengan kehidupan desa bisa ditampilkan untuk tujuan pariwisata dengan suasana yang berbeda dengan fungsi sebenarnya. Menurutnya, komodifikasi budayadalam Tari Caci justru bermanfaat dalam melestarikan dan mengenalkannya pada generasi muda, akan tetapi seperti yang masyarakat akui bahwa yang ditampilkan untuk pariwisata bukanlah Tari Caci yang sebenarnya. Lebih lanjut, ditampilkan atau tidaknya Tari Caci dalam pariwisata, para pemuda tetap tidak memahami apa makna sebenarnya dari ritual tersebut. Artinya, ditampilkannya komodifikasi Tari Caci untuk kegiatan pariwisata justru melestarikan tradisi tari tersebut karena secara berulang terus-menerus dipentaskan.

Kedua, tentang komodifikasi tradisi untuk pariwisata juga dibahas oleh Yamashita (1994) yang melakukan penelitian tentang upacara penguburandi Tana Toraja. Dalam artikelnya, Yamashita menceritakan bagaimana ritual penguburan salah satu tokoh aristokrat yang bernama *Puang Mengkendek* telah menjadi obyek pariwisata nasional dan internasional. Penguburan Toraja ini telah terdaftar dalam kalender event Indonesia. Tidak hanya itu, ritual ini juga telah diliput televisi Jepang. Di akhir artikelnya, Yamashita berpendapat bahwa pada masa sekarang budaya telah menjadi sesuatu yang dimanipulasi, diselenggarakan, dan dikonsumsi secara *macro socioeconomic-cum cultural context*.

Ketiga, berbicara tentang pariwisata di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Bali yang sudah sangat terkenal sebagai salah satu destinasi pariwisata internasional. Salah satunya adalah milik David Harnish (2005) yang berjudul '*Teletubbies in Paradise: Tourism, Indonesianisation and Modernisation in Balinese Music*'. Dalam artikelnya, Harnish mengatakan bahwa pariwisata berperan dalam mempercepat sekularisasi pertunjukan tari di Bali. Kesadaran akan hal ini telah mendorong Gubernur Bali pada tahun 1971 mengadakan kongres tari yang secara khusus membahas tarian tradisi apa saja yang bisa disajikan ke turis dan mana yang tidak dengan tujuan untuk melindungi kesakralannya. Di akhir artikel, Harnish menggambarkan orang Bali sebagai orang pulau yang bersinggungan dengan budaya tradisional, yang mana budaya itu mereka pahami sebagai modern. Harnish menganalogikan masyarakat Bali seperti *teletubbies*, yaitu *unadulterated globalism*. Menurutnya, negoisasi pariwisata, Indonesianisasi, dan modernisasi budaya generasi muda yang berorientasi global telah menjadikan mereka merangkul *unadulterated globalism* dan gaya populer internasional dengan acuh terhadap model tradisi yang klasik.

Seluruh artikel di atas menceritakan bagaimana komodifikasi budaya, dalam hal ini tradisi, untuk pariwisata terjadi atas tradisi yang sifatnya warisan dari nenek moyang. Fenomena ini menjadi bagian dari apa yang disebut Hobsbawm sebagai *inventing tradition*. Dalam pendahuluan buku yang berjudul '*The Invention of Tradition*', Hobsbawm menjelaskan *inventing tradition* sebagai proses formalisasi dan ritualisasi, ditandai dengan mengacu kepada masa lalu, dan mungkin memaksakan adanya pengulangan (1983:4). Dalam buku ini, Hobsbawm menekankan perbedaan antara tradisi (*tradition*) dengan adat (*custom*), yang mana menurutnya tradisi memiliki praktek tetap (*fixed*) dan biasanya diformalkan melalui pengulangan. Sementara pada adat, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan dan inovasi jika dirasa perlu.

Artikel ini mencoba memberikan wawasan baru tentang komodifikasi tradisi. Jika penelitian-penelitian sebelumnya menggambarkan bagaimana komodifikasi terjadi pada tradisi warisan nenek moyang, tradisi pada penelitian ini tidak demikian. Komodifikasi di sini terjadi atas tradisi yang sengaja diciptakan untuk tujuan pariwisata. Hanya saja, konsep dan gaya tradisi yang berupa ritual dengan persembahan meniru konsep dan gaya tradisional yang lazim dilaksanakan orang Jawa sejak dahulu. Inilah yang menjadikan kegiatan ini dikatakan sebagai salah satu upaya melestarikan kebudayaan warisan nenek moyang, padahal Festival 1000 tumpeng baru pertama kali dilaksanakan.

Kajian tentang potensi ekonomi yang dimiliki oleh kawasan atau teritorial tertentu di Indonesia sebelumnya telah dilakukan oleh Harsanto (2013) melalui artikelnya yang berjudul 'Pengembangan kerjasama antara daerah untuk pengelolaan potensi daerah'. Dalam artikel tersebut, Harsanto mengatakan bahwa tiap daerah memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda di mana dipengaruhi oleh ketersediaan produksi pertanian, perdagangan, dan infrastruktur industri, namun kami melihat hal yang berbeda dari Harsanto. Potensi ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan produksi pertanian, perdagangan, dan infrastruktur industri, melainkan juga oleh bagaimana arah kebijakan pemerintah setempat. Dalam konteks Gunung Kelud, sektor yang digali sebagai potensi ekonomi adalah pariwisata.

Dari sudut pandang lain, pariwisata terikat dengan ruang karena tidak bisa dipisahkan dengan teritorial atau wilayah di mana objek tersebut berada. Ruang, teritorial atau wilayah, sangat menentukan bagaimana objek pariwisata tersebut dikelola. Tidak sedikitnya keuntungan baik material maupun non-material yang didapatkan dari kegiatan pariwisata membuat penguasaan atas ruang yang menjadi lokasi wisata menjadi faktor krusial. Dengan demikian, ruang dalam konteks studi ini adalah wilayah objek pariwisata, bukanlah ruang hampa melainkan sesuatu yang dikontestasikan. Hal ini karena terkait dengan perebutan kekuasaan atas kontrol pengelolaan wilayah pariwisata.

Perebutan kuasa atas ruang bisa dijelaskan melalui konsep tentang teritorial dan *territoriality*. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi teritorial secara umum adalah 'bagian wilayah (daerah hukum) suatu negara', akan tetapi konsep tentang teritorial juga bisa dirumuskan secara lebih jauh lagi melalui diskursus tentang ruang. Teritorial bukan hanya sebuah bentang alam, namun juga sebagai sebuah ruang yang dipertahankan dan dikontestasikan. Teritorial bukanlah sesuatu yang terberi, namun lebih merupakan sebagai konstruksi sosial dan kreasi manusia (Delaney 2005: 10). Oleh karena itu, teritorial bersifat dinamis karena struktur penguasaan dan kontrol pun bisa berubah.

Sementara itu, aktivitas dalam mempertahankan kuasa dan kontrol atas ruang atau teritorial disebut dengan *territoriality*. *Territoriality* mengasumsikan adanya hubungan antara teritorial dengan fenomena sosial lainnya seperti struktur politik, komposisi sosial masyarakat, bahkan adat dan kebudayaan. Sack (1986: 55) mengartikan *territoriality* sebagai strategi individu atau kelompok untuk mengontrol sumber daya serta mengontrol masyarakat melalui cara mengontrol teritorial yang mereka diami. Strategi tersebut dilakukan oleh aktor yang mempunyai otoritas politik dan legitimasi untuk mengontrol distribusi, alokasi dan kepemilikan sumber daya; menjaga ketertiban dan menegakkan otoritas (Elden 2007: 804). Dengan demikian, *territoriality* juga bisa dipahami sebagai bentuk pengelolaan ruang berdasarkan otoritas politik. Berdasarkan konsep *territoriality*, teritorial bukan hanya sebagai ruang fisik atau bentang alam semata namun juga sebagai suatu entitas politik yang bisa dimiliki, didistribusikan dipetakan, dikalkulasi, dibatasi, dan dikontrol (Elden 2007: 810).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil riset etnografi yang dilakukan dengan total waktu selama 1 tahun, yaitu dari September 2014 sampai September 2015. Sebenarnya kegiatan penelitian awal telah dilakukan pada Januari 2014 dengan rencana topik penelitian pariwisata di Gunung Kelud. Sebulan setelahnya, Gunung Kelud meletus. Penelitian harus tertunda selama 8 bulan karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Apalagi kondisi Gunung Kelud yang rusak, banyaknya relawan, dan proses rekonstruksi lingkungan setelah letusan semakin membuat kegiatan penelitian tentang pariwisata tidak akan dapat dilakukan.

Kegiatan penelitian dilanjutkan pada September 2014 setelah mendapatkan informasi bahwa Gunung Kelud telah kembali dibuka untuk pariwisata. Selama 8 bulan ketika Gunung Kelud masih tertutup untuk wisatawan, penelitian justru banyak dilakukan melalui kajian literatur. Sulitnya mendapatkan literatur yang khusus membahas Gunung Kelud menjadikan aktivitas mengkaji literatur berujung pada karya sastra Kediri klasik. Dari sana gagasan tentang kearifan lokal muncul. Oleh karenanya, begitu mendapatkan informasi tentang Gunung Kelud yang telah dibuka kembali maka yang pertama ditanyakan kepada informan adalah bagaimana masyarakat menggunakan pengetahuan lokal dalam rangka menghadapi letusan Gunung Kelud yang sudah rutin terjadi. Kunjungan ini membawa penelitian pada mega-ritual yang menjadi kegiatan rutin masyarakat bersama PEMDA sebagai bagian dari penghormatan masyarakat kepada Gunung Kelud.

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Sugihwaras (dalam Bahasa Indonesia berarti kaya dan sehat), Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Penelitian ini merupakan penelitian etnografi dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan cara kerja antropologi. Data penelitian dikumpulkan melalui metode observasi partisipasi (selama persiapan dan proses ritual), wawancara mendalam, dan studi literatur. Untuk wawancara, informan kunci dari penelitian berjumlah 15 orang yang terdiri dari juru kunci, mantan juru kunci, tiga orang sesepuh yang dianggap memiliki hubungan spiritual dengan Gunung Kelud, Perangkat Desa, masyarakat di sekitar lokasi ritual, dan warga yang turut serta dalam acara ritual.

Proses triangulasi data dilakukan dengan mempertanyakan kembali pertanyaan penelitian yang sama kepada informan yang berbeda serta dengan mencari informasi dari sumber sekunder seperti surat kabar baik cetak maupun *online*. Terakhir, penelitian ini sangat diuntungkan dengan terlibatnya peneliti dalam proses ritual. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian etnografi, karena sesuai dengan yang disampaikan oleh (Murchison 2010:23) bahwa topik riset etnografi harus bisa mengidentifikasi satu dari *place*, *people*, dan *event*. Ketiganya ada dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Gunung Kelud, kepercayaan rakyat, dan peran juru kunci

Gunung Kelud adalah *strato volcano* yang paling membahayakan di Jawa Timur. Gunung ini memiliki siklus letusan 8–24 tahun yang seringkali diikuti dengan lahar yang mematikan (Bernard 2000). Dalam kurun waktu 100 tahun terakhir, letusan Gunung Kelud tercatat terjadi pada 20 Mei 1919, 31 Agustus 1951, 26 April 1966, 10 Februari hingga 13 Maret 1990, September hingga November 2007, dan terakhir adalah 13 Februari 2014. Di antara letusan tersebut, yang paling banyak memakan korban jiwa adalah letusan tahun 1990 yaitu sebanyak 210 jiwa. Sementara letusan yang berdampak paling parah adalah letusan tahun 2014, yaitu menyebarnya abu vulkanik sampai Yogyakarta (sekitar 200 km dari pusat letusan) dan Surabaya (berjarak 120 km). Abu vulkanik bahkan dikatakan sampai Purbalingga di Jawa Tengah yang berjarak 300 km dari pusat letusan di Kabupaten Kediri – Jawa Timur. Tersebar debu vulkanik dengan jarak yang jauh ini juga berakibat parah bagi sektor transportasi udara. Sehari setelah letusan, sebanyak 7 bandara ditutup, yaitu bandara di Surabaya, Yogyakarta, Solo, Malang, Semarang, Cilacap, dan yang paling jauh adalah Bandung. Dari penutupan ini, tercatat sebanyak 586 penerbangan yang dibatalkan (Antara news 2015).

Salah satu tokoh masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini menceritakan kejadian meletusnya Gunung Kelud yang terjadi pada 13 Februari 2014. Beliau menceritakan bahwa meskipun letusan tahun 2014 berdampak sangat parah, bagi warga desa Sugihwaras belum separah letusan 1966. Pada letusan 1966, material letusan berupa abu, pasir, batu, dan air. Kondisi ini membuat banyak sekali pohon besar dan bambu, juga pemukiman warga hancur berantakan. Sementara pada letusan 2014, hal yang diingat adalah bahwa letusan ini sangat mengerikan karena material letusan berupa api pijar yang menyala. Melihat hujan api berterbangan, seluruh warga sudah berpikir bahwa rumah mereka pasti terbakar. Ternyata dugaan itu meleset karena Desa Sugihwaras aman dan tidak ada satu bangunan pun yang terbakar.

Di sisi lain, menjelang peristiwa meletusnya Gunung Kelud, masyarakat Desa Sugihwaras sudah siap terhadap letusan yang dapat datang sewaktu-waktu. Apalagi, menjelang letusan tersebut BMKG terus-

menerus memberikan informasi tentang status gunung. Dalam hal ini masyarakat Gunung Kelud lebih memilih mempercayai informasi dari BMKG dibandingkan dari juru kunci.

Sebagaimana gunung berapi di Jawa, di Gunung Kelud juga terdapat juru kunci. Tentang pentingnya tokoh juru kunci bagi masyarakat pegunungan ini, Gunung Merapi memiliki cerita sendiri. Lavigne et al. (2008: 280) dan Maarif et al., (2012: 4) mengatakan bahwa di lereng Merapi masyarakat menaruh kepercayaan kepada tokoh informal yang menjadi juru kunci. Pada letusan tahun 2010, juru kunci Merapi sebagai orang yang dipercaya mengetahui kapan waktu meletusnya gunung dan dianggap mampu berkomunikasi secara supranatural dengan gunung, ternyata meninggal karena awan panas. Padahal, Mbah Marijan menjadi panutan banyak orang. Hal ini terbukti ketika Mbah Marijan tidak mau mengungsi, banyak orang yang mengikutinya. Sehingga, sampai terjadinya letusan, Mbah Marijan meninggal bersama 29 orang lainnya (Viva News 2015).

Jika masyarakat Gunung Merapi sangat mempercayai juru kunci yang menjadikan sebagian masyarakat menolak mengungsi meskipun sudah diperintahkan oleh pihak berwenang (Lavigne et al. 2008:280), hal yang sebaliknya justru terjadi di Gunung Kelud. Pada letusan tahun 2014, masyarakat di lereng Gunung Kelud sangat taat kepada anjuran BMKG. Mereka tidak bertanya kepada juru kunci tentang kondisi gunung. Terkait hal ini, salah satu informan mengatakan bahwa bagi mereka, orang-orang tua dan termasuk juru kunci merupakan wakil masyarakat untuk memimpin ritual. Akan tetapi, untuk status gunung masyarakat tidak mempercayakan sepenuhnya kepada juru kunci, dan lebih memilih mengikuti BMKG.

Masyarakat Gunung Kelud tidak lagi menganut juru kunci sebagai penentu keputusan ketika Kelud sedang meletus. Hal ini terutama dimulai sejak Mbah Ronggo –juru kunci- salah meramalkan waktu meletusnya Kelud pada letusan 2007. Memang setelah meletusnya Merapi tahun 2006, juru kunci (Mbah Marijan) menjadi orang yang paling dicari media ketika gunung yang dijaganya meletus. Hal ini dilakukan juga terhadap Mbah Ronggo ketika Kelud akan meletus tahun 2007. Tidak hanya media, bahkan pada masa-masa tersebut KAPOLRI sampai menemui Mbah Ronggo di pengungsian di Kediri (Tempo 2015). Kepopuleran Mbah Ronggo juga membuat Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, mengajak Mbah Ronggo sebagai juru kunci untuk bekerja sama dengan aparat dalam upaya menyelamatkan warga. Hal tersebut disampaikan ketika Presiden RI mengunjungi para pengungsi di Kediri (Antara News 2015). Kesalahan dalam peramalan ini menyudutkan Mbah Ronggo. Masyarakat menyatakan bahwa Mbah Ronggo memang tidak bisa memprediksi status gunung.

Komodifikasi tradisi pada Festival 1000 Tumpeng

Gunung Kelud dianggap ‘mengayomi’ masyarakat Kediri dan Blitar. Secara implisit, hal ini bahkan tercantum dalam sebuah lagu populer berbahasa Jawa sebagai kesenian rakyat. Gunung Kelud, sebagaimana gunung di Pulau Jawa yang lain, lekat dengan konsep kepercayaan lokal. Kelud, dalam Jawa adalah membersihkan sesuatu dari debu atau menyapu. Kelud juga bisa diartikan sebagai alat untuk membersihkan sesuatu.

Masyarakat setempat percaya bahwa setiap Gunung Kelud meletus merupakan saat alam membersihkan unsur-unsur negatif pada kehidupan manusia dan juga sebagai bagian harmonisasi kembali antara manusia dengan alam. Sebagian besar masyarakat juga mempercayai bahwa meletusnya Gunung Kelud adalah tanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di Indonesia. Misalnya, lahirnya Presiden pertama RI Soekarno dua minggu setelah meletusnya gunung pada 23 Mei 1901, letusan 26 April 1966 terjadi 1 bulan setelah terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret yang menandai perpindahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, terakhir adalah letusan 13 Februari 2014 atau lima bulan menjelang pemilihan presiden dimana sebagian orang percaya Pemilu ini sebagai Pemilu yang menentukan kondisi Indonesia ke depan.

Ikatan masyarakat dengan Gunung Kelud juga termanifestasi melalui folklor. Dalam artikel ini, folklor tentang Gunung Kelud adalah cerita rakyat. Sebagaimana yang diceritakan oleh Soeprapto (2014: 68), cerita rakyat tersebut menokohkan seorang perempuan yang bernama Dewi Kilisuci yang digambarkan sangat cantik. Dewi Kilisuci ini dipinang oleh dua orang laki-laki yang bernama Lembu Suro dan Mahesa Suro. Dewi Kilisuci bermaksud menolak pinangan kedua laki-laki tersebut. Sebagai

upaya untuk mempersulit pinangan tersebut, Dewi Kilisuci meminta keduanya menggali dua sumur, satu berbau wangi dan satu lagi berbau amis. Setelah sumur selesai digali, Dewi Kilisuci meminta Lembu Suro dan Mahesa Suro untuk masuk ke dalam sumur tersebut dengan tujuan membuktikan bahwa sumur tersebut masing-masing memang berbau wangi dan amis. Ketika Lembu Suro dan Mahesa Suro berada di dalam sumur, Dewi Kilisuci meminta anak buahnya untuk menutup sumur tersebut. Akhirnya, Lembu Suro dan Mahesa Suro mati di dalam sumur yang mereka gali sendiri. Akan tetapi, sebelum mati, Lembu Suro sempat mengucapkan kutukan bahwa akan membalas berkali lipat: Kediri akan menjadi sungai (*kali*), Blitar jadi halaman (*latar*), dan Tulungagung jadi danau (*kedung*). Kutukan Lembu Suro inilah yang ditakutkan masyarakat yang juga mendorong mereka menggelar ritual setiap satu tahun sekali.

Menurut sesepuh di Desa Sugihwaras, selain mengadakan ritual tahunan, masyarakat juga mempercayai adanya pantangan dan larangan terkait Gunung Kelud. Menurut masyarakat, Gunung Kelud menyampaikan larangan bagi perempuan untuk mendaki. Larangan ini disampaikan melalui para sesepuh yang memiliki kekuatan supranatural untuk berkomunikasi dengan Gunung Kelud. Akan tetapi, sejak Gunung Kelud dibuka sebagai destinasi pariwisata sekitar tahun 2002, aturan ini dilanggar. Perempuan secara bebas naik turun Gunung Kelud, apalagi sejak tahun 2006 sampai sekarang ketika pemerintah menggabungkan momentum ritual masyarakat ini dengan festival yang berisi hiburan-hiburan modern dengan nama Festival Kelud.

Tahun 2007, pemerintah daerah Kabupaten Kediri menginginkan adanya acara fenomenal yang bisa menyita perhatian publik. Melalui Camat Ngancar, dengan persetujuan juru kunci digelarlah ritual larung sesaji Kelud yang menampilkan tumpeng setinggi 1 meter. Dalam tradisi Jawa, *tumpeng* yang berupa nasi berbentuk kerucut seperti gunung dengan lauk-pauk, merupakan menu utama dalam ritual selamat Jawa. Akan tetapi, ternyata tumpeng yang diarak dalam ritual ini tidak sepenuhnya berisi nasi. Melainkan, di dalam nasi tersebut dimasukkan *kukusan* yang dibalik, yaitu alat tradisional terbuat dari anyaman bambu berbentuk kerucut yang dimasukkan ke dalam dandang untuk mengukus makanan. Di atas kukusan itulah nasi baru diletakkan dengan dihias berbagai lauk-pauk. Jadi, sebenarnya tumpeng 1 meter tersebut bagian dalam nasi tidak ada isinya.

Ritual ini sebenarnya sudah ditentang oleh para sesepuh. Akan tetapi, orang yang menjabat sebagai juru kunci menyetujuinya. Sesepuh lain banyak yang tidak terlibat dalam ritual ini. Bagi mereka, hal ini sama saja dengan memperlakukan gunung. Melalui letusan tahun 2007, para sesepuh percaya Gunung Kelud marah dan ingin menunjukkan kepada publik bahwa dia juga bisa membuat tumpeng yang lebih besar dengan memunculkan anak gunung yang –tentu saja- berbentuk kerucut seperti tumpeng. Peristiwa ini menjadikan para sesepuh dan masyarakat semakin tidak mempercayai juru kunci.

Tentang munculnya anak gunung tahun 2007 ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Gunung Kelud mengatakan kemunculan itu dikarenakan tipe letusan yang efusif. Yaitu letusan di mana magma yang keluar berupa lelehan. Letusan jenis ini baru pertama kali terjadi di Gunung Kelud, karena sebelumnya erupsi Gunung Kelud selalu bersifat eksplosif atau letusan. Di sisi lain, para sesepuh di sekitar Gunung Kelud melihatnya bukan semata-mata sebagai peristiwa alami, melainkan bernuansa supranatural akibat kesalahan masyarakat, dalam hal ini juru kunci. Setelah letusan tahun 2007 dan sampai sekarang, kawah gunung yang semula berupa danau berubah menjadi tonjolan anak gunung dan danau tidak ada lagi. Sejak saat itu, ritual yang dilakukan masyarakat tidak lagi disebut ritual larung sesaji melainkan hanya ritual sesaji.

Ketika penelitian ini dilaksanakan, yaitu pada tahun 2014, pemerintah sekali lagi ingin menggelar acara yang fenomenal dan bisa menarik perhatian masyarakat luas. Kali ini adalah 1000 tumpeng. Perlu diingat bahwa Gunung Kelud meletus pada awal 2014, dan peristiwa itu menurunkan jumlah wisatawan sampai 70%. Dengan digelarnya festival ini, pemerintah berharap kunjungan wisatawan akan kembali mengalami peningkatan. Festival ini sekaligus menunjukkan bahwa Gunung Kelud sudah aman untuk dikunjungi wisatawan.

Menjelang festival 1000 tumpeng ini, para sesepuh sebenarnya sudah mengkhawatirkan apakah jumlah tumpengnya akan tepat 1000 atau tidak. Mereka khawatir jangan sampai peristiwa 2007 yang dianggap membuat gunung marah akan terulang kembali. Untuk mengantisipasi hal ini, para sesepuh

tetap menjalankan ritual yang merupakan kewajiban tahunan di atas gunung pada malam hari. Mereka menganggap festival 1000 tumpeng yang digelar keesokan harinya sebagai perayaan warga masyarakat yang tidak mengandung nilai spiritualitas. Hal inilah yang memang dilakukan oleh warga masyarakat sejak pemerintah menjadikan ritual sesaji sebagai kegiatan tahunan Kabupaten Kediri, yaitu warga masyarakat menjalankan ritual dua kali, pertama pada malam hari yang memang menjadi ritual sakral, dan pagi hari besoknya yang merupakan kegiatan dari kabupaten dan bersifat seremonial. Dalam proses pembuatan 1000 tumpeng, perintah untuk membuat tumpeng ini diberikan kepada 5 dusun oleh camat melalui Kepala Desa Sugihwaras. Artinya, masing-masing diminta mempersiapkan tumpeng sejumlah 200.

Ketika festival sedang berlangsung, masyarakat Sugihwaras sudah mengantisipasi ledakan jumlah pengunjung. Dalam hal ini pengunjung adalah masyarakat yang berpartisipasi, pemerintah, ataupun wisatawan. Untuk itu, berbeda dengan ritual sebenarnya yang diadakan di jalan menuju gunung dan menghadap langsung ke gunung, festival 1000 tumpeng ini justru diadakan di lapangan parkir yang luas. Ketika hari acara, mereka datang membawa tumpeng dengan menggunakan pakaian adat Jawa berwarna hitam dan ikat kepala batik yang juga berwarna hitam.

Acara ini tidak hanya dihadiri masyarakat umum. Ibu Bupati Kediri, Dinas Pariwisata, dan jajaran pemerintahan lain di wilayah Kabupaten Kediri juga hadir. Kelompok-kelompok agama Hindu dan kepercayaan juga dilibatkan. Bahkan, sejumlah ambulans juga terlihat sebagai antisipasi jika terjadi sesuatu yang buruk pada pengunjung.

Acara ini dibuka oleh Camat Ngancar yang juga memberikan pidato. Dalam pidatonya, Camat menyampaikan bahwa acara ini diselenggarakan oleh masyarakat Ngancar dengan tujuan untuk melestarikan adat, nilai tradisional, kearifan lokal. Acara ini juga diadakan sebagai perwujudan rasa syukur dan sebagai upaya pendekatan alam dan manusia. Festival yang diikuti semua kelompok agama dimaknai camat sebagai upaya menyatukan masyarakat Jawa sebagai manusia yang berbudi pekerti luhur. Terakhir, dalam pidato yang sama, camat juga menyampaikan bahwa salah satu maksud digelarnya festival 1000 tumpeng ini adalah agar pariwisata di Gunung Kelud lebih dikenal lagi.

Pada hari yang sama, sejumlah media meliput jalannya ritual 1000 tumpeng ini, antara lain TV nasional, antara lain Berita Satu (diupload di Youtube 2 November 2014), Metro TV (diupload ke Youtube oleh akun Berita Nyata pada 2 November 2014) dan Net TV (diupload ke Youtube pada 3 November 2014). Selain TV, surat kabar juga meliput berita yang sama, seperti Kompas online dan Surabaya pagi online pada tanggal 2 November 2014. Ketika diwawancarai wartawan tv, Camat Ngancar mengatakan bahwa kegiatan ini telah rutin dilaksanakan sebagai rasa terima kasih karena masyarakat tidak mengalami kerugian pada erupsi tahun 2014. Padahal, ketika makna dari kegiatan ini ditanyakan kepada masyarakat yang hadir di sana, sebagian besar mengaku tidak mengerti selain hanya acara yang diselenggarakan oleh pemerintah. Prosesi acara juga sepenuhnya dipegang oleh pemerintah. Tidak ada tokoh adat, atau sesepuh desa yang diminta mengisi acara. Doa yang dibacakan dalam prosesi ini juga tidak sepenuhnya berbahasa Jawa seperti ritual tahunan yang dilaksanakan para sesepuh pada malam sebelumnya, melainkan doa secara Islam yang berbahasa Arab.

Territoriality dan sengketa Gunung Kelud

Wilayah Gunung Kelud berada di antara tiga kabupaten yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Malang. Tapal batas gunung ini masih menjadi sengketa antara Kabupaten Blitar dan Kediri sejak tahun 2001. Sampai saat ini, kedua kabupaten terus berusaha untuk mendapatkan hak kepemilikan atas wilayah Gunung Kelud yang menjadi wilayah sengketa. Wilayah yang masih menjadi sengketa antara dua pemerintah kabupaten tersebut antara lain berada di sekitar wilayah Desa Sugihwaras di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, Desa Sumberasri Kecamatan Nglepok dan Desa Karangrejo Kecamatan Garum Kabupaten Blitar (Sari 2014: 6). Desa-desa tersebut merupakan area terakhir atau paling ujung yang dihuni penduduk sebelum mencapai daerah Puncak Kelud. Oleh karena itu, desa-desa tersebut memiliki nilai strategis yang tinggi karena menjadi semacam pintu masuk ke wilayah Puncak Gunung Kelud.



Gambar1.

Masyarakat melingkari tumpeng yang berjumlah 1000

Sumber: koleksi pribadi penulis



Gambar2.

Masyarakat memperebutkan makanan dari dalam tumpeng di akhir acara

Sumber: koleksi pribadi penulis

Sejak dulu dan sampai sekarang, akses menuju Kelud hanya bisa dilewati melalui Kediri. Inilah salah satu alasan yang menjadikan pemerintah Kabupaten Kediri merasa berwenang membangun infrastruktur dan mengembangkan pariwisata di Kawasan Gunung Kelud. Masyarakat dan pemerintah melihat Gunung Kelud memiliki potensi pariwisata yang dapat meningkatkan penghasilan baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Mereka beranggapan bahwa dalam pariwisata tidak mengenal batas wilayah tetapi pengelolaan untuk tujuan kesejahteraan bersama. Hal ini dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat Blitar sebagai sesuatu yang tidak tepat, karena batas wilayah belum disepakati (Paradhisa 2012).

Kondisi berubah setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Keluarnya peraturan ini seolah mengingatkan Blitar, dan mendorong mereka lebih giat mengumpulkan dokumen. Dengan berdasar pada peraturan tersebut,

Pemerintah Blitar membentuk Tim Penegas Batas Daerah (TPBD). Tim tersebut melakukan inventarisasi dasar hukum tertulis dan tidak tertulis yang bisa dijadikan sebagai penegasan batas daerah, merekomendasikan peta batas daerah, dan melakukan supervisi terhadap sistem dan mekanisme penegasan batas daerah (Sari 2014:8). Sementara di pihak Kediri, upaya untuk memenangkan sengketa kepemilikan Gunung Kelud dilakukan dengan semakin gencar melakukan pembangunan wisata di Kawasan Gunung Kelud (Paradhisa 2012; Sari 2014).

Konflik tersebut pada akhirnya dimediasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/2012. Surat Keputusan tersebut menyebabkan tiga kecamatan di daerah Gunung Kelud yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Blitar, yakni Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, dan Kecamatan Nglepok, kemudian masuk menjadi wilayah Kabupaten Kediri, akan tetapi tidak seperti yang diharapkan bahwa surat keputusan ini menandai berakhirnya sengketa, Pemerintah Blitar justru menggugat Gubernur Jawa Timur di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pemerintah Blitar juga meminta bantuan beberapa lembaga akademik untuk mengumpulkan bukti, yaitu Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, dan Institut Teknologi Bandung (Sari 2014).

Pada tahun 2014, melalui Surat Keputusan Nomor 188/828/KPTS/013/2014, Gubernur Jawa Timur mencabut Surat Keputusan tahun 2012 yang menyatakan bahwa Gunung Kelud merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kediri. Pencabutan ini bertujuan untuk menciptakan ruang dialog antara kedua pihak, karena dengan demikian Gunung Kelud belum menjadi milik salah satu pihak dan dalam status quo. Dalam masa seperti ini, Pemerintah Blitar terus mengumpulkan bukti kepemilikan Kelud, sementara Kediri terus-menerus membangun dan mempromosikan pariwisata.

Pencabutan Surat Keputusan ini kembali digugat oleh Kediri, sebelum akhirnya pada tahun 2015 PTUN mengabulkan gugatan Kediri yang artinya mengembalikan kepemilikan Gunung Kelud kepada Kediri. Sampai paper ini ditulis, perebutan Gunung Kelud masih berlanjut. Bahkan, saat ini permasalahan ini sudah ada di tangan Kementerian Dalam Negeri yang dianggap mampu menyelesaikan perebutan ini.

Langkah Pemerintah Kabupaten Kediri untuk terus meningkatkan pembangunan pariwisata, termasuk mendukung secara penuh Festival 1000 Tumpeng di Desa Sugihwaras yang notabene masuk dalam wilayah sengketa, adalah bagian dari strategi untuk tetap memiliki penguasaan atas kontrol ruang atau *territoriality*. Festival yang diadakan setahun sekali tersebut kemudian bukan hanya terkait dengan tujuan pariwisata namun juga penegasan kontrol atas wilayah. Festival 1000 Tumpeng adalah bagian dari cara Pemerintah Kediri untuk mendapatkan legitimasi masyarakat atas otoritas politik terhadap wilayah sengketa. Pemerintah Kediri juga memberikan bantuan untuk menggelar kegiatan Festival Kelud di Desa Sugihwaras. Dengan demikian, warga desa pun merasakan kehadiran pemerintah daerah karena mendatangkan keuntungan ekonomi yang cukup banyak. Masyarakat desa pun kemudian tetap mendukung wilayahnya untuk tetap masuk ke dalam batas Kabupaten Kediri.

Simpulan

Festival 1000 Tumpeng bukanlah tradisi yang memang diwariskan oleh nenek moyang masyarakat di Gunung Kelud. Festival ini merupakan gagasan dari Pemerintah Kabupaten Kediri bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kediri yang didukung pemerintah di tingkat kecamatan dan desa. Acara ini sengaja diadakan pada waktu yang bersamaan dengan Bulan Suro, yaitu bulan diadakannya ritual sesaji yang memang dilaksanakan warga setiap tahun sebagai bagian dari kepercayaan lokal.

Dalam konteks pariwisata, pemerintah terlihat ingin mencitrakan Festival 1000 Tumpeng sebagai pariwisata budaya. Dalam banyak studi pariwisata seperti yang tercantum dalam pendahuluan di atas, pariwisata budaya dekat dengan komodifikasi budaya. Hal ini menimbulkan perdebatan antara kelompok yang pro dan kontra. Perdebatan ini muncul karena kekhawatiran adanya pengurangan nilai dan makna atas budaya atau tradisi yang dikomodifikasi untuk tujuan pariwisata yang tentu saja ujungnya adalah urusan ekonomi.

Secara umum, perkembangan pariwisata di mana pun berada tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan ekonomi. Begitupun ketika jenis pariwisata yang dijual adalah budaya, atau tradisi. Dalam hal ini, kami berpendapat bahwa sebagai mana Erik Cohen (1988) ungkapkan, bahwa

komodifikasi tidak perlu merusak budaya yang ada, meskipun terjadi penambahan atau perubahan terhadap budaya yang sudah ada sebelumnya. Dalam konteks Festival 1000 Tumpeng tentu saja tidak ada nilai yang berubah, karena memang kegiatan ini baru pertama kali diselenggarakan. Ritual yang asli diselenggarakan warga masyarakat pada malam hari, secara sakral, dan bukan untuk tujuan pariwisata. Oleh karenanya, jika Hobsbawm memiliki konsep *inventing tradition*, maka dalam artikel ini kami mengistilahkannya sebagai *innovating tradition*. Pemerintah melalui masyarakat tidak menciptakan tradisi baru, tetapi memodifikasi yang sudah ada dan menampilkannya pada saat yang berbeda.

Dari paparan di atas, ritual ini mengemas tiga lapis makna dan tujuan di balik pelaksanaan festival 1000 tumpeng. Lapis pertama, yaitu ungkapan yang disampaikan oleh Camat Ngancar dalam pidatonya: bahwa kegiatan ini merupakan upaya melestarikan tradisi nenek moyang untuk menuju manusia Jawa yang berbudi luhur. Lapis kedua, secara tersirat dikatakan diakhir pidato Camat bahwa secara tidak langsung kegiatan ritual, atau lebih tepatnya seremonial, seperti ini dapat meningkatkan daya tarik pariwisata. Lapis ketiga, tidak tersampaikan dalam pidato dan masyarakat tidak mengetahuinya, bahwa kegiatan seremonial ini bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Kediri membangun pariwisata di Kawasan Kelud yang juga bagian dari upaya menegaskan kepemilikan Gunung Kelud atas Kabupaten Blitar.

Daftar Pustaka

- 1000 Tumpeng Meriahkan Festival Kelud 2014 (2014) [Diakses 23 Februari 2016].
<http://surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962b3218a6c6632eddc77b0da81a145434>.
- Antara News (2007) Presiden Ajak Juru kunci Gunung Kelud Bekerja Sama Selamatkan Rakyat. [Diakses 16 Desember 2015]. <http://www.antaraneews.com/berita/81393/presiden-ajak-juru-kunci-gunung-kelud-bekerja-sama-selamatkan-rakyat>.
- Antara News (2014) Tujuh bandara ditutup akibat letusan Kelud. [Diakses 9 Desember 2015].
<http://www.antaraneews.com/berita/419065/tujuh-bandara-ditutup-akibat-letusan-kelud>.
- Berita Nyata (2014) Ritual Sesaji Gunung Kelud. [Diakses 23 Februari 2016].
<https://www.youtube.com/watch?v=iBLBfpZitR8>.
- Berita Satu Tv (2014) Ritual Seribu Tumpeng di Lereng Gunung Kelud. [Diakses 23 Februari 2016].
<https://www.youtube.com/watch?v=FnWuscM0Zaw>.
- Bernard (2000) Geochemistry of the crater lake of Kelut volcano, Indonesia. Unpublished.
- Cohen E (1988) Authenticity and commoditization in tourism. *Annals of Tourism Research*. Vol. 15: 371-386.
- Delaney D (2005) *Territory: a short introduction*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Elden S (2007) Land, terrain, territory. *Progress in Human Geography* 34 (6): 779-817.
- Erb M (2001) Conceptualising culture in a global age: Playing Caci in Manggarai. Presented as a seminar in the Southeast Asian Studies Program, National University of Singapore, April 4, 2001.
- Lavigne F, Coster BD, Juvin N, Flohic F, Gaillard JC, Texier P, Morin J, Sartohadi J (2008) People's behaviour in the face of volcanic hazards: Perspectives from Javanese communities, Indonesia. *Journal of Volcanology and Geothermal Research* 172: 273-287.
- Harnish D (2005) Teletubbies in paradise: Tourism, Indonesianisation and modernisation in Balinese music. *Yearbook for Traditional Music*, Vol. 37:103-123.
- Harsanto BT (2013) Pengembangan kerjasama antara daerah untuk pengelolaan potensi daerah. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 26 (1):25-34.
- Hitchcock M & Putra IND (2007) *Tourism, development and terrorism in Bali*. Hampshire: Ashgate Publishing.
- Hobsbawm E (1983) *The invention of tradition*. Dalam: Ranger Terence (ed). London, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney: Cambridge University Press.
- Jawa Pos (2015) Wali Kota Batu Eddy Rumpoko Sulap Kota Batu Menjadi Ikon Wisata Jatim. [Diakses 30 November 2015]. <http://www2.jawapos.com/baca/artikel/12977/Wali-Kota-Batu-Eddy-7Rumpoko-Sulap-Kota-Batu-Menjadi-Ikon-Wisata-Jatim>.

- Kompas (2014) Warga Gelar Ritual Sesaji Gunung Kelud. [Diakses 23 Februari 2016].
<http://regional.kompas.com/read/2014/11/02/13512341/Warga.Gelar.Ritual.Sesaji.Gunung.Kelud>.
- KR Jogja (2015) Wow, PAD Pariwisata Gunungkidul Rp 15 Miliar. [Diakses 30 November 2015].
<http://krjogja.com/read/243056/wow-pad-pariwisata-gunungkidul-rp-15-miliar.kr>.
- Maarif S, Pramono R, Kinseng RA, & Sunarti E (2012) Kontestasi pengetahuan dan pemaknaan tentang ancaman bencana alam (Studi Kasus Ancaman Bencana Gunung Merapi). *Jurnal Penanggulangan Bencana*. Volume 3 Nomor 1, Juni 2012:1-13.
- Murchison JM (2010) *Ethnography essentials: Designing, conducting, and presenting your research*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Official Net News (2014) 1000 Tumpeng dalam Ritual Sesaji Gunung Kelud -NET12. [Diakses 23 Februari 2016]. https://www.youtube.com/watch?v=Ny8t7Ld_X3w.
- Paradhisa NZ (2012) Konflik kepentingan daerah: Studi kasus sengketa perebutan Gunung Kelud antara Pemerintah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Blitar. *Jurnal Politik Muda*, Vol 2 No.1, Januari-Maret 2012:136-146.
- Sack RD (1983) Human territoriality a theory. *Annals of the Association of American Geographers*, Vol. 73. No. 1, Maret 1983: 55-74.
- Sari IP (2014) Konflik perbatasan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya*, Januari 2014.
- Soeprapto (2014) Radio komunitas, radio penyelamat. *Gema BNPB*. Vol. 5 No. 3 Desember 2014:66-70.
- Tempo (2007) Jenderal Sutanto 'Sowan' Ke Mbah Ronggo. [Diakses 16 Desember 2015]. <http://nasional.tempo.co/read/news/2007/10/19/055109794/jenderal-sutanto-sowan-ke-mbah-ronggo>.
- Viva News (2010) Maridjan Sang Penjaga, Setia Sampai ajal. [Diakses 9 Desember 2015]. <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/185408-maridjan-sang-penjaga>.
- Yamashita S (1994) Manipulating ethnic tradition: The funeral ceremony, tourism, and television among the Toraja of Sulawesi. *Indonesia*, No. 58 (Oct., 1994): 69-82.